

ABSTRAK

Silma Rahmawati, 1203030115: "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan Terhadap Pemeliharaan Jalan Rusak Oleh Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Perspektif Siyasah Dusturiyah."

Pemeliharaan jalan di Kabupaten Bandung telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan. Penerbitan Peraturan Daerah ini merupakan langkah yuridis yang dilakukan oleh lembaga legislatif agar dapat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung untuk meminimalisir kerusakan jalan, akan tetapi masih banyak jalan rusak yang masih belum diperbaiki. Sehingga hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat dan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui: 1). Implementasi Peraturan Daerah terhadap pemeliharaan jalan rusak oleh DPUTR. 2). Kendala yang dihadapi oleh DPUTR terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemeliharaan jalan rusak. 3). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori utama: teori implementasi kebijakan, teori kewenangan, dan teori siyasah dusturiyah (masalah mursalah).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan jalan dalam konteks pemeliharaan jalan rusak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung telah berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Dinas terkait telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, meskipun terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian hasil yang optimal. 2) Kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam implementasi kebijakan pemeliharaan jalan rusak mencakup berbagai aspek yang menghambat efektivitas pelaksanaannya yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Kebijakan Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, implementasi Peraturan Daerah ini seharusnya tidak hanya berfokus pada kepentingan administratif dan teknis, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pemeliharaan Jalan, Siyasah Dusturiyah